

Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo di Kompas.com

Ahmad Fauzan Akbar, Nabilah & Muhammad Damar Ramadhan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir H. Juanda No.95, Cempaka Puti, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten

Email: ahmadfznakbar@gmail.com

Abstrak

Praktik korupsi di Indonesia merupakan masalah utama yang menyebabkan kerugian finansial dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan keadilan. Fenomena ini telah menjadi kebiasaan yang meluas sejak sebelum kemerdekaan hingga era Reformasi, dan melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan. Media massa memainkan peran penting dalam mempublikasikan kasus korupsi, membentuk opini publik, dan mempengaruhi agenda politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing pemberitaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo oleh Kompas.com dari 29 Februari hingga 10 Mei 2024. Metode analisis framing digunakan untuk mengamati bagaimana media membentuk realitas dan menyajikan berita, serta mengidentifikasi dinamika kekuasaan dan hubungan antar pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com memberikan fokus pada aspek-aspek tertentu yang mempengaruhi pandangan publik terhadap kasus tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang pengaruh framing media terhadap persepsi publik tentang kasus korupsi di Indonesia.

Kata-kata Kunci: Analisis Framing, Kompas.com, Korupsi, Media Massa, Syahrul Yasin Limpo

Abstract

Corrupt practices in Indonesia are a major problem that causes financial losses and undermines public trust in government and justice system. This phenomenon has become a widespread since pre independence till Reformasi era, and involves various levels of government. The mass media plays an important role in publicizing corruption cases, shaping public opinion, and influencing the political agenda. This study aims to analyze the framing of the news coverage of the Syahrul Yasin Limpo corruption case by Kompas.com from February 29 to May 10, 2024. The framing analysis method is used to observe how the media shapes reality and presents news, as well as identify power dynamics and relationships between the parties involved. The results of the study show that Kompas.com focus on certain aspects that affect the public's view of the case. This study provides an understanding of the influence of media framing on public perception of corruption cases in Indonesia.

Keywords: Analysis of Framing, Kompas.com, Corruption, Mass Media, Syahrul Yasin Limpo

Pendahuluan

Praktik korupsi merupakan salah satu isu yang telah lama menjadi perhatian utama di Indonesia. Korupsi bukan hanya memberikan kerugian keuangan pada negara, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan keadilan. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Korupsi di Indonesia telah menjadi kebiasaan yang meluas sepanjang sejarah, dari waktu sebelum kemerdekaan, periode Orde Lama dan Orde Baru, hingga era Reformasi.

Praktik korupsi telah ada sejak zaman dahulu, terutama sejak masyarakat mulai mengembangkan sistem administrasi. Dalam berbagai kasus korupsi yang sering dilaporkan media, tindakan korupsi sering kali terikat dengan kekuasaan, administrasi publik, dan struktur

pemerintahan. Korupsi juga sering terhubung dengan ranah politik. Meskipun dianggap sebagai pelanggaran hukum, korupsi memiliki konotasi tersendiri yang berbeda dari pelanggaran hukum lainnya. Selain hubungannya dengan politik, korupsi juga terkait dengan ekonomi, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Karena kompleksitasnya, Organisasi internasional seperti PBB memiliki lembaga khusus yang bertugas memantau korupsi di seluruh dunia (Puspito T. N., dkk, 2011).

Di tengah upaya penindakan dan pencegahan korupsi yang terus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum, media memainkan peran kunci dalam mempublikasikan kasus-kasus korupsi kepada masyarakat. Media, sebagai salah satu pilar demokrasi, memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi agenda politik serta kebijakan pemerintah. Berbagai platform media menjadi saluran utama bagi publik untuk memperoleh informasi tentang berita terkini, termasuk perkembangan dalam kasus-kasus korupsi. Namun, peran media dalam melaporkan kasus korupsi sering kali menjadi perdebatan, terutama terkait dengan cara penekanan berita, *framing* naratif, dan keterlibatan pihak-pihak tertentu.

Media massa selalu melakukan *framing* atau pembingkaihan terhadap berita yang mereka siarkan, mau secara langsung atau secara tidak langsung. Dengan melangsungkan *framing*, media atau bahkan politisi dapat menonjolkan sudut pandang tertentu dari suatu peristiwa, yang kemudian dapat mempengaruhi pandangan pembaca atau pemirsa terhadap peristiwa tersebut.

Secara ideal, media seharusnya beroperasi secara independen tanpa adanya campur tangan dari keperluan di luar bidang pers yang dapat memberikan pengaruh terhadap apa yang ditayangkan atau bagaimana berita dikumpulkan seorang wartawan. Tapi, dalam realitasnya, banyak kekuatan eksternal yang berupaya mempengaruhi pemberitaan yang disajikan oleh media, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau rezim tertentu. Banyak faktor seperti politik, ekonomi, dan kekuasaan berperan dalam mempengaruhi bagaimana berita disampaikan oleh media.

Setiap orang yang memberikan pesan, entah itu melalui pernyataan, komentar, atau wawancara, memiliki tujuan tertentu yang dapat memengaruhi bagaimana pesan tersebut disampaikan dan diterima oleh publik. Terdapat kecenderungan untuk menekankan atau menyoroti aspek-aspek tertentu yang mendukung agenda atau pandangan tertentu, atau untuk menekan informasi yang mungkin merugikan. Sehingga yang membedakan antara situasi yang berbeda adalah sejauh mana terjadi penekanan atau pengaruh yang dipaksakan dalam proses penyampaian pesan tersebut. Dalam menganalisis suatu media mengonstruksi keabsahan atau realitas, sering kali digunakan pendekatan analisis pembingkaihan.

Analisis *framing* adalah metode analisis yang dipakai untuk mengamati bagaimana media membentuk realitas. Dalam analisis *framing*, kita meneliti bagaimana sebuah kejadian atau peristiwa dipahami dan disajikan oleh media. Karena berbagai media dapat meliput suatu peristiwa dengan cara yang berbeda, maka realitas tersebut bisa dipahami dan dibangun dengan cara yang berbeda pula oleh masyarakat. *Framing* merujuk pada cara suatu peristiwa dipahami dan bagaimana kesan tersebut disampaikan dalam laporan media (Eriyanto, 2005).

Melalui analisis *framing*, penulis dapat mengidentifikasi dinamika kekuasaan dan hubungan antar pihak yang terlibat dalam proses pembentukan berita. Analisis ini memungkinkan penulis untuk mengetahui siapa yang mengontrol narasi, siapa yang dianggap sebagai lawan, siapa yang mendapat manfaat, dan siapa yang mungkin dirugikan dalam proses tersebut. Kesimpulan semacam ini mungkin dapat dicapai karena analisis *framing* adalah suatu bentuk ilmu kreatif yang memberikan keleluasaan untuk mengartikan realitas dengan memakai teori dan teknik tertentu.

Dalam kasus korupsi yang menyertakan politisi dari Partai Nasdem, seperti Syahrul Yasin Limpo seumpamanya, pemberian judul berita lebih fokus dan tegas. Berikut adalah berita yang dimuat oleh Kompas.com edisi 29 Februari 2024 pasca sidang perdananya.

“Sidang SYL: Didakwa Lakukan Pemasaran Capai Rp 44,5 Miliar, Ada Aliran Dana ke Partai” Rabu (28/2/2024). Judul itu mengarahkan perhatian pada peristiwa yang menjadi sorotan utama. Sebab, Syahrul Yasin Limpo adalah kader dari fraksi Nasdem yang menjadi menteri dan menteri ketiga dari Partai Nasdem yang terlibat kasus korupsi. Syahrul Yasin Limpo juga menyusul dua adiknya, Dewi Yasin Limpo dan Haris Yasin Limpo yang sama-sama terjerat kasus korupsi. Maka, cara media melakukan *framing* juga mengkonstruksi isu merupakan hal yang menarik didalami. Bertujuan, untuk mengetahui seperti apa media melakukan *framing* dan mengkonstruksi berita kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini memilih Kompas.com sebagai fokus penelitian karena kepopulerannya di kalangan masyarakat Indonesia dan reputasinya sebagai sumber berita yang terpercaya. Selain itu, Kompas.com memiliki jumlah pengunjung yang signifikan serta kebijakan editorial yang memengaruhi cara berita disajikan.

Artikel ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana *framing* pemberitaan mengenai berita kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo oleh Kompas.com. Pada penelitian ini, peneliti fokus terhadap pemberitaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo oleh Kompas.com pada edisi 29 Februari sampai 10 Mei 2024. Analisis akan difokuskan pada empat aspek pembingkai yang diidentifikasi oleh Robert Entman, yakni: *Define problems, diagnose causes, make moral judgements, and treatment recommendations*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menerapkan metode analisis *framing* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Model *framing* yang digunakan adalah model Robert Entman dengan empat aspek *framing* yang diidentifikasi yaitu: *to define problems* (mendefinisikan Masalah), *to diagnose causes* (menganalisis penyebab atau sumber masalah), *to make moral judgements* (menyatakan penilaian moral), dan *treatment recommendations* (menyoroti penyelesaian).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini didapatkan dari teks berita kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo sebagai kader dari fraksi Nasdem yang menjadi menteri dan menteri ketiga dari Partai Nasdem yang terlibat kasus korupsi di Kompas.com periode edisi 29 Februari hingga 10 Mei 2024. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian dalam bentuk sudah tersedia dari publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai jurnal serta penelitian lain yang sudah terlaksana sebelumnya. Seperti di antaranya buku dan hasil penelitian atau jurnal. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data dari telaah pustaka untuk mendukung peneliti memperoleh data yang akurat dan jelas. Selain itu, telaah pustaka membantu peneliti menjelaskan konsep-konsep yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah dan Perkembangan Kompas.com

Kompas adalah satu media besar di Indonesia yang menjadi pelopor di media *online* sejak 1995. Kompas.com pertama kali hadir pada 14 September 1995 dengan nama awal Kompas *Online*. Awalnya Kompas *Online* atau KOL memiliki alamat jaringan yang sama dengan alamat kompas.co.id yang menampilkan replika berita harian Kompas yang terbit di hari yang sama.

Tujuan media Kompas saat itu untuk memberikan layanan kepada para pembaca yang memiliki keterbatasan akses dan tempat. Kompas *Online* hadir untuk menyajikan berita kepada

para pembaca di seluruh penjuru Indonesia ataupun luar negeri secara *real time*. Pada 1996 alamat jaringan Kompas *Online* berubah menjadi **www.kompas.com** untuk memberikan layanan yang maksimal, dan hal ini yang membuat nama Kompas *Online* semakin dikenal.

Minat masyarakat yang besar terhadap dunia digital membuat Kompas *Online* dikembangkan menjadi perusahaan bisnis di bawah PT Kompas *Cyber Media* (KCM) pada 6 Agustus 1998. Pada era ini Kompas *Online* lebih masyhur dengan sebutan KCM, selain itu para pembaca KCM juga mendapatkan pembaruan dari berita yang terjadi sepanjang hari.

Setelah melewati berbagai tantangan zaman, Kompas *Online* *me-rebranding* dirinya menjadi Kompas.com pada 29 Mei 2008. Media Kompas dikenal karena selalu menghadirkan jurnalisme yang bermakna. Oleh karena itu *rebranding* Kompas.com untuk menegaskan bahwa laman berita ini sebagai acuan bagi jurnalisme di tengah arus informasi yang dipertanyakan kebenarannya.

Syahrul Yasin Limpo dalam Pemberitaan Kasus Korupsi di Kompas.com

Syahrul Yasin Limpo lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 15 Maret 1955, dan memiliki karir panjang sebagai kepala daerah. Sebelum menjabat sebagai menteri, ia mengabdikan lebih dari 20 tahun di Sulawesi Selatan, dengan rincian 10 tahun sebagai Bupati Kabupaten Maros dan lebih dari 10 tahun sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Karirnya dimulai pada tahun 1980 sebagai PNS di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretariat Wilayah Daerah (Sekwilda) Provinsi Sulawesi Selatan.

Empat tahun kemudian, pada 1984 hingga 1987, ia diangkat menjadi camat di Bontonompo, Kabupaten Gowa. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini kemudian menduduki berbagai posisi penting di Pemkab Gowa dan Pemprov Sulsel. Pada tahun 1994, ia memasuki dunia politik sebagai kader Golkar dan berhasil menjadi Bupati Kabupaten Gowa selama dua periode dari 1994 hingga 2002. Pada tahun 2003, ia terpilih sebagai Wakil Gubernur Sulsel mendampingi Amin Syam. Pada tahun 2007, bersama Agus Arifin Nu'mang, ia memenangkan Pilkada melalui PDI-P dan menjabat sebagai Gubernur Sulsel selama dua periode hingga 2018.

Syahrul kemudian bergabung dengan Partai Nasdem dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada Pemilu 2019, namun gagal terpilih. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Pertanian RI, mewakili Partai Nasdem dalam kabinet. Menurut laporan LHKPN terbaru dari KPK, kekayaan Syahrul tercatat sekitar Rp 20 miliar, dengan mayoritas berupa aset properti senilai Rp 11,31 miliar. Ia memiliki 16 properti yang tersebar di Kota Gowa dan Makassar, sebagian besar hasil usahanya sendiri. Selain itu, ia juga memiliki enam mobil senilai Rp 1.475.000.000, termasuk Toyota Alphard dan Mercedes Benz, serta sebuah motor Harley Davidson. Syahrul juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 1.149.970.000, serta kas dan setara kas senilai Rp 6.118.817.382.¹

Hasil Analisis Framing Robert Entman pada Pemberitaan Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo di Kompas.com

Peneliti menggunakan analisis framing dari Robert Entman, yang terbagi menjadi empat bagian utama. Pertama, *Define Problems* (Pendefinisian Masalah): Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang menjadi elemen utama dalam framing. Ini menentukan bagaimana peristiwa atau isu dipahami. Peristiwa yang sama bisa dipahami dengan cara yang berbeda, dan bingkai yang berbeda ini akan membentuk realitas yang berbeda. Kedua, *Diagnose Causes* (Menentukan Penyebab Masalah): Elemen ini mengidentifikasi siapa yang

¹ [Resmi Tersangka Korupsi, Ini Profil dan Kekayaan Syahrul Yasin Limpo Halaman all - Kompas.com](#) (Diakses pada 24 Juni 2024 pukul 10.15)

dianggap sebagai penyebab masalah, berkaitan erat dengan 'apa' dan 'siapa'. Khalayak dapat melihat siapa penyebab masalah dan apa faktor pemicunya. Pemahaman tentang suatu peristiwa akan menentukan siapa dan apa yang dianggap sebagai sumber masalah. Ketiga, *Make Moral Judgment* (Membuat Penilaian Moral): Tahap ini melibatkan pembentukan pandangan moral terhadap peristiwa yang terjadi. Setelah masalah diidentifikasi dan penyebabnya diketahui, diperlukan argumen yang kuat untuk mendukung gagasan yang sudah ada. Keempat, *Treatment Recommendation* (Menyarankan Penyelesaian): Elemen ini menekankan pada solusi masalah dan menawarkan atau membenarkan cara penanganan masalah serta memprediksi hasilnya. Ini digunakan untuk menilai tindakan wartawan dan pilihan yang diambil untuk menyelesaikan masalah.

Berdasarkan hasil penelusuran di Kompas.com, peneliti mengumpulkan data dari berita online yang terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo. Totalnya, peneliti berhasil mengumpulkan 10 berita yang dipublikasikan mulai dari tanggal 29 Februari hingga 10 Mei 2024 (lihat tabel 1).

Tabel 1.1

Berita Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo edisi 29 Februari – 10 Mei 2024

NO	Waktu Publikasi	Judul Berita
1	29 Februari 2024	Sidang SYL: Didakwa Lakukan Pemerasan Capai Rp 44,5 Miliar, Ada Aliran Dana ke Partai
2	1 Mei 2024	Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian
3	2 Mei 2024	SYL Gunakan Anggaran Kementan untuk Pribadi, Stafsus Sri Mulyani: Tanggung Jawab Masing-masing Kementerian
4	3 Mei 2024	KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif
5	6 Mei 2024	Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan
6	7 Mei 2024	Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg
7	8 Mei 2024	Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta
8	9 Mei 2024	Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan
9	9 Mei 2024	Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan
10	10 Mei 2024	Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sumber: Olah Data Primer, Juni 2024.

Berdasarkan judul-judul berita yang terdapat dalam tabel tersebut, terlihat bahwa Kompas.com memberikan perhatian yang besar terhadap kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo di Indonesia. Media ini menggambarkan persoalan tersebut sebagai bagian dari dinamika politik, dengan variasi dalam judul-judul berita yang disajikan. Berdasarkan 10 berita yang dikumpulkan, peneliti memilih hanya berita yang relevan dengan empat aspek framing Robert Entman. Dalam analisis tersebut, 4 berita di antaranya secara dominan menggambarkan cara Kompas.com membingkai peristiwa korupsi yang terjadi.

Bertolak dari empat aspek framing Robert Entman tersebut, berikut adalah sampel berita yang dipilih penulis sebagai bahan analisis:

Tabel 1.2

Sidang SYL: Didakwa Lakukan Pemerasan Capai Rp 44,5 Miliar, Ada Aliran Dana ke Partai

<i>Define Problems (Pendefinisian Masalah)</i>	Tindakan pemerasan yang dilakukan oleh SYL dengan nilai mencapai Rp 44,5 miliar.
<i>Diagnose Causes (Menentukan Penyebab Masalah)</i>	Memeras pejabat Kementerian Pertanian demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Ancaman untuk mengganti atau mengancam pejabat yang tidak memenuhi permintaannya
<i>Make Moral Judgment (Membuat Penilaian Moral)</i>	SYL menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, keluarga, bahkan partai politik (Nasdem).
<i>Treatment Recommendation (Menyarankan Penyelesaian)</i>	Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sumber: Olah Data Primer, Juni 2024.

Define Problems, yang ditonjolkan oleh Kompas.com jelas dan mudah di mengerti oleh pembaca. Masalah yang diangkat menunjukkan mengenai kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan tindakan pemerasan yang dilakukan oleh SYL dengan nilai mencapai Rp 44,5 miliar menjadi sorotan utama, yang dijelaskan melalui surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Diagnose Causes, dalam kasus SYL yang dilaporkan oleh Kompas.com peran sentral Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai Menteri Pertanian yang diduga memanfaatkan kekuasaannya untuk memeras pejabat eselon I dan direktorat di Kementerian Pertanian. Tindakan korupsi ini mencakup permintaan persentase anggaran dari berbagai unit di Kementerian, yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, serta politik. Selain SYL, keterlibatan pejabat kementerian lainnya seperti eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta, eks Sekretaris Jenderal Kasdi Subagyono, Staf Khusus Imam Mujahidin Fahmid, dan Ajudan Panji Harjanto juga menjadi penyebab karena mereka diduga mendukung atau menuruti permintaan korupsi SYL. Meski demikian, sorotan utama tetap pada Syahrul Yasin Limpo sebagai tokoh utama yang melakukan korupsi.

Make Moral Judgment, Kompas.com mengevaluasi tindakan SYL secara moral dengan menyoroti bagaimana penggunaan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, keluarga, bahkan partai politik (Nasdem).

Treatment Recommendation, Berita ini mengarah pada rekomendasi untuk penyelesaian kasus ini secara hukum, dengan menggambarkan proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK terkait korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tabel 1.3

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Define Problems (Pendefinisian Masalah)	Pemerasan dan Korupsi di Kementerian Pertanian oleh SYL.
Diagnose Causes (Menentukan Penyebab Masalah)	Pemerasan ini diduga dilakukan SYL dengan memerintahkan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; dan eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono; Staf Khusus Bidang Kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan Ajudannya, Panji Harjanto.
Make Moral Judgment (Membuat Penilaian Moral)	Dalam perkara ini, jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
Treatment Recommendation (Menyarankan Penyelesaian)	Atas perbuatannya, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sumber: Olah Data Primer, Juni 2024.

Define Problems, yang diangkat oleh Kompas.com menjelaskan bagaimana JPU dari KPK akan terus membongkar dugaan penerimaan uang haram dari pemerasan dan korupsi di Kementerian Pertanian oleh SYL.

Diagnose Causes, Kompas.com jelas menonjolkan bahwa penyebab masalah atau pelaku dari peristiwa pemerasan adalah Syahrul Yasin Limpo dengan memerintahkan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; dan eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono; Staf Khusus Bidang Kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan Ajudannya, Panji Harjanto. Sehingga sorotan utama tertuju pada Syahrul Yasin Limpo sebagai tokoh sentral yang diduga memberikan arahan kepada saksi-saksi diatas.

Make Moral Judgment, cara wartawan Kompas.com membuat keputusan moral dilihat dari penjelasan mengenai jumlah yang terima oleh SYL sebesar Rp 44,5 miliar dan digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

Treatment Recommendation, Berita ini mengarah pada rekomendasi untuk penyelesaian kasus ini secara hukum, dengan menggambarkan proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK terkait korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tabel 1.4

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

<i>Define Problems (Pendefinisian Masalah)</i>	Penggunaan uang korup untuk gaya hidup mewah, umrah, dan kegiatan pribadi.
<i>Diagnose Causes (Menentukan Penyebab Masalah)</i>	Penyalahgunaan wewenang oleh SYL dan korupsi berantai.
<i>Make Moral Judgment (Membuat Penilaian Moral)</i>	Kelakuan SYL yang suka meminta keperluan pribadinya ditanggung oleh anak buah membuat menimbulkan korupsi berantai di Kementan.
<i>Treatment Recommendation (Menyarankan Penyelesaian)</i>	Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Sumber: Olah Data Primer, Juni 2024.

Define Problems, Kompas.com mendefinisikan masalah utama sebagai tindakan korupsi sistematis oleh SYL yang melibatkan pemerasan terhadap pejabat Kementerian Pertanian untuk membiayai gaya hidup pribadinya dan kegiatan ibadahnya. Kompas.com menyoroti bahwa SYL menggunakan kekuasaannya untuk memaksa pejabat Kementan membiayai kebutuhan pribadi seperti umrah, kurban, dan gaji pembantu. Dengan memfokuskan pada gaya hidup mewah dan aktivitas pribadi SYL, berita ini mendefinisikan masalah sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Berita yang dibuat juga menyajikan detail-detail yang konkret dan mencolok, seperti angka uang yang dipergunakan dan jenis kegiatan yang dibiayai, untuk menunjukkan kedalaman dan dampak dari tindakan korupsi SYL. Ini menciptakan narasi bahwa korupsi ini melibatkan skala yang besar dan terstruktur.

Diagnose Causes, Kompas.com menganalisis penyebab masalah sebagai tindakan korupsi yang dilakukan oleh SYL dengan memanfaatkan posisinya sebagai Menteri Pertanian. SYL dituduh meminta uang untuk berbagai kebutuhan pribadi, seperti sapi kurban dan umrah, dari para pejabat Kementan. Ini menunjukkan bahwa penyebab utama masalah adalah penyalahgunaan wewenang oleh SYL untuk kepentingan pribadi dan kekayaan. Berita juga mengungkapkan bahwa tindakan SYL menyebabkan korupsi berantai, di mana pejabat Kementan terpaksa ikut serta dalam praktik korupsi untuk memenuhi tuntutan SYL, bahkan membuat laporan perjalanan dinas fiktif untuk menutupi pengeluaran.

Make Moral Judgment, Kompas.com secara jelas menilai tindakan SYL sebagai bentuk korupsi yang tidak etis dan melanggar hukum. Berita ini menggunakan bahasa yang menekankan aspek-aspek negatif dari tindakan SYL, seperti "kelakuan politikus Nasdem," "meminta tabiat hidup glamor," dan "korupsi berantai."

Treatment Recommendation, Kompas.com menyoroti pentingnya proses hukum untuk menyelesaikan masalah korupsi dan menyarankan bahwa tindakan hukum yang tegas terhadap SYL adalah langkah yang diperlukan. Berita ini menegaskan bahwa pengadilan dan proses hukum yang sedang berjalan adalah cara untuk mengatasi masalah korupsi yang dilakukan oleh SYL.

Tabel 1.5

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

<i>Define Problems (Pendefinisian Masalah)</i>	Jual-beli status WTP dalam audit keuangan oleh BPK.
<i>Diagnose Causes (Menentukan Penyebab Masalah)</i>	Permintaan uang oleh auditor BPK untuk memberikan opini WTP.
<i>Make Moral Judgment (Membuat Penilaian Moral)</i>	Penilaian negatif terhadap praktik jual-beli status WTP sebagai tindakan korupsi.
<i>Treatment Recommendation (Menyarankan Penyelesaian)</i>	Penegakan hukum dan penyelidikan lebih lanjut oleh KPK.

Sumber: Olah Data Primer, Juni 2024.

Define Problems, Kompas.com mendefinisikan masalah utama sebagai praktik korupsi yang melibatkan jual-beli status opini WTP dalam proses audit BPK. Berita menyoroti bahwa praktik jual-beli status WTP masih terjadi dan melibatkan jumlah uang yang besar. Ini menegaskan bahwa masalah utama adalah integritas dan kejujuran dalam audit keuangan oleh BPK.

Diagnose Causes, Pada isi berita Kompas.com menerangkan mengenai Hermanto yang mengungkap bahwa auditor BPK meminta uang Rp 12 miliar agar Kementan mendapatkan status WTP. Ini menunjukkan bahwa penyebab utama masalah adalah korupsi di dalam tubuh BPK.

Make Moral Judgment, Kompas.com secara jelas menilai praktik jual-beli status WTP sebagai tindakan korupsi yang sangat merugikan dan tidak etis. Berita menggunakan bahasa yang menyoroti keburukan dari praktik korupsi, seperti "jual-beli," "meminta uang pelicin," dan "dugaan suap." Serta penekanan pada permintaan uang oleh auditor BPK dan sejarah korupsi serupa menciptakan penilaian moral bahwa praktik ini sangat merugikan dan mencoreng integritas auditor.

Treatment Recommendation, Kompas.com menyoroti pentingnya penyelidikan dan penegakan hukum untuk menyelesaikan masalah korupsi dan jual-beli status WTP. Berita menekankan bahwa KPK harus mengusut tuntas dugaan suap ini, dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan kesaksian di persidangan. Dengan mengungkapkan masalah ini di media, Kompas mendorong transparansi dalam proses audit BPK dan akuntabilitas para pejabat yang terlibat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis framing model Robert Entman, Kompas.com cenderung memperlakukan kasus Syahrul Yasin Limpo sebagai masalah hukum. Mereka menonjolkan fakta-fakta terkait korupsi, kronologi pemerasan, keterlibatan orang-orang terdekat, dan penggunaan uang haram oleh Syahrul Yasin Limpo. Media ini juga berupaya seobjektif mungkin dalam menyoroti keterlibatan oknum-oknum selain Syahrul Yasin Limpo. Dalam membuat penilaian moral, Kompas.com menekankan kuatnya dugaan terhadap Syahrul Yasin Limpo sebagai pelaku korupsi dan pemerasan sebagai akar permasalahan utama. Dalam menyajikan solusi atau rekomendasi penanganan, Kompas.com berusaha memberikan edukasi mengenai korupsi serta langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah terhadap kasus semacam ini.

Kompas.com mengonstruksi kasus Syahrul Yasin Limpo tidak hanya sebagai masalah hukum, tetapi juga mempertimbangkan kedekatannya dengan status sosial sebagai Menteri Pertanian dan bagian dari partai politik yang memiliki beberapa menteri lain terlibat dalam kasus korupsi. Peneliti mengharapkan Kompas.com tetap independen dalam pemberitaannya,

tanpa memperhitungkan kedekatannya dengan pembaca, dan selalu objektif dalam menginformasikan berita. Dari penelitian ini, disarankan agar optimalisasi penggunaan media massa sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan, karena media massa tetap efektif sebagai alat pendidikan dan dakwah. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis, jeli, dan selektif terhadap setiap berita yang disajikan.

Daftar Pustaka

Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik Media, (Yogyakarta LKIS, Yogyakarta, 2005).

Hasyifa Nanda, Skripsi: *Analisis Framing Pemberitaan Dengan Tajuk "Jokowi: The King Of Lips Service" di Kompas.com.* (Jakarta: UIN Jakarta, 2022), Hlm. 27.

Puspito T. N., Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Y. K. (2011). *Anti-Korupsi Anti-Korupsi Pendidikan.*

Rulli Nasrullah, Metode Penelitian *Jurnalisme* Pendekatan Kualitatif, (Simbiosa Rekatama Media: 2020).

Setiadi Wicipto. (2018). *KORUPSI DI INDONESIA* (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi).

Struktur, A., Unsur, D.A.N., & Detik, B. (2022). *SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR*

Website

<https://inside.kompas.com/about-us> (Diakses pada 24 Juni 2024 pukul 09.30 WIB)

[Resmi Tersangka Korupsi, Ini Profil dan Kekayaan Syahrul Yasin Limpo Halaman all - Kompas.com](#) (Diakses pada 24 Juni 2024 pukul 10.15)

Sidang SYL: Didakwa Lakukan Pemerasan Capai Rp 44,5 Miliar, Ada Aliran Dana ke Partai Halaman all- Kompas.com (Diakses pada 10 Mei 2024 pukul 10.15).